



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN**  
**PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka  
Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp (0717) 423578, Fax (0717) 423578 Pangkalpinang

Kepada :  
Yth. Sekretaris Daerah Prov. Kep. Bangka  
Belitung c.q Kepala Biro Pemerintahan  
Prov. Kep. Bangka Belitung  
di-  
PANGKALPINANG

**SURAT PENGANTAR**  
NOMOR : 600/776/PUPRPRKP/2022

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Data dan surat pernyataan LKPJ 2021	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk ditindaklanjuti.


Diterima tanggal.....

Pangkalpinang, 24 Januari 2022

Yang Menerima,

Kepala Dinas,

(.....)  
NIP.



JANTANI ALI, S.T.  
NIP. 19731022 200501 1 007



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN**  
**PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN**

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Telp (0717) 423578, Fax (0717) 423578 Pangkalpinang

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA LKPJ 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jantani Ali, S.T.  
NIP : 19731022 200501 1 007  
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IV.b  
Jabatan : Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas PUPRPRKP

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh data dalam dokumen yang disampaikan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 adalah benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalpinang, 24 Januari 2022

KEPALA DINAS,  
  
JANTANI ALI, S.T.  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19731022 200501 1 007

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Pelaksana Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>TOTAL BELANJA</b>					318.387.256.566	261.023.744.784			
I	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dinas PUPRPRKP		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Sakip	Poin	77	77	23.696.194.980	17.614.787.306	1. DPA (awal tahun) dan DPPA (triwulan akhir) yang terlambat terbit menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan kegiatan di Dinas, kegiatan lelang dan tanda tangan kontrak dengan penyedia terhambat, sehingga beberapa pelaksanaan pembangunan fisik pun terganggu. 2. Penggabungan OPD di pertengahan tahun juga menyebabkan hampir seluruh kegiatan keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan sempat terhenti. 3. Kondisi Pandemi dan regulasi perjalanan yang dinamis menyebabkan realisasi belanja perjalanan dinas di hampir seluruh bidang cukup rendah.	Masalah-masalah tersebut cukup sulit diatasi karena dibatasi oleh wewenang dan juga masalah tersebut merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Sehingga upaya yang dilakukan adalah dengan terus berusaha bekerja secara profesional dan juga berdoa kepada Allah S.W.T.	
					Survey Kepuasan Payananan Internal	Poin	80	80					
			1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang tersedia	Dokumen	9	9	666.295.148	238.756.204			
			2	Kegiatan Admintrasi Keuangan	Jumlah layanan Keuangan yang diselenggarakan	Layanan	4	4	16.400.856.533	12.521.421.196			
			3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat layanan administrasi kepegawaian	%	100	100	137.523.000	51.197.775			
			4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	%	100	100	575.773.648	250.270.957			
			5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang daerah yang memadai	Jenis	10	10	3.212.951.991	2.722.824.000			
			6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	1.852.734.772	1.554.380.416			
			7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	750.059.888	175.936.758			
			II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (%)	%	5,00	3,93	32.619.078.166	21.614.240.623	Kurang usulan dari pihak Desa/Instansi terkait, Terjadi Pandemic Covid 19 sehingga menghambat koordinasi dan kesulitan mengumpulkan pihak terkait dan terhambat PPKM	Dilakukan Audit, Diusulkan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait	
					Persentase Penyediaan Air Baku	%	0,11	0,00			Kegiatan direcofusing	Dianggarkan kembali tahun berikutnya	
					Rasio Layanan Irigasi (%)	%	22,97	22,97					

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urutan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Pemmasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD	
				1	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Ha)	Hektar	2400,00	0,00	13.709.390.986	5.219.714.388	Kurang usulan dari pihak Desa/Instansi terkait, Terjadi Pandemi Covid 19 sehingga menghambat koordinasi dan kesulitan mengumpulkan pihak terkait dan terhambat PPKM	Dilakukan Audit, Diusulkan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait	
					Volume Ketersediaan Air Baku (M3)	M3	24000,00	0,00						
				2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Luas daerah irigasi kewenangan provinsi dengan sistem irigasi primer dan sekunder yang dikembangkan dan	Hektar	1686,00	1686,00	18.809.687.169	16.394.526.235	1 Paket Putus Kontrak dengan Progres ± 50%, adanya sisa tender dikarenakan pekerjaan tidak selesai 100% setelah diberi kesempatan dengan perpanjangan waktu selama 50 Hari	Melakukan koordinasi lebih lanjut ke pihak terkait dan lakukan surveil lapangan	
				III	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah bangunan gedung yang terselenggara	%	33,00	16,50	6.714.178.706	3.067.516.150			
				1	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah kumulatif penetapan dan penyelenggaraan Bangunan Gedung Strategi Provinsi yang ditetapkan	Unit	1,00	1,00	6.714.178.706	3.067.516.150	1. Progres fisik pekerjaan hingga 31 Desember 2021 sebesar 50%; 2. Jumlah pekerja yang kurang memadai/ sesuai dengan aktivitas pekerjaan yang ada, disebabkan jumlah ketersediaan pekerja lokal yang kurang dan mobilitas pekerja dari luar daerah terkendala adanya PPKM dan protokol covid 19; 3. Keterlambatan pengiriman barang untuk penutup atap dan kekurangan bahan konstruksi untuk batu bata merah; 4. Intensitas curah hujan yang tidak diantisipasi dengan baik oleh penyedia jasa konstruksi; 5. Terjadi perubahan lingkup pekerjaan oleh Penerima manfaat bangunan untuk penambahan ruang kerja Kajati, ruangan di Aspidbus dan ruangan Asdatun	1. Melakukan perpanjangan (addendum) waktu selama 50 hari kalender dengan diberlakukan denda berjalan berpedoman pada Perpres 12 tahun 2021; 2. Mengajukan surat ke Gubernur, AIP dan TAPD untuk dapat dianggarkan pada APBD Perubahan 2022 untuk pembayaran sisa pekerjaan	
				IV	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan penataan bangunan dan lingkungan	%	100,00	100,00	389.446.133	358.483.676	-	-	
				1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan bangunan dan lingkungan	Dokumen	1,00	1,00	389.446.133	358.483.676	-	-	
				V	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisimantap (%)	%	91,00	94,64	250.683.766.164	215.889.398.233			
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan dan peningkatan jalan	Km	30,40	30,40	164.751.998.475	144.888.753.699			
					Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Hasil Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan	Km	804,88	804,88	79.815.587.042	66.973.928.538	Terlambatnya pencairan dana SMI dan pandemi Covid-19 serta penggabungan dinas menyebabkan terhambatnya pencairan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu perencanaan.	Perpanjangan waktu masa pelaksanaan kegiatan.		
					Panjang jalan dalam kondisi mantap hasil pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jembatan	Km	3808,11	3808,11	6.016.179.637	4.026.715.796	Terlambatnya pencairan dana SMI dan pandemi Covid-19 serta penggabungan dinas menyebabkan terhambatnya pencairan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu perencanaan.	Perpanjangan waktu masa pelaksanaan kegiatan.		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Urutan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD
				VI	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	Rasio ketersediaan penyelenggaraan jasa konstruksi	%	50,00	51,99	305.688.494	214.762.272		
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Persentase sertifikasi tenaga ahli	%	42,13	42,13	227.781.691	175.935.788	Dengan adanya pandemi Covid-19, maka pelaksanaan Optimalisasi Mobile Training Unit (MTU) tidak dapat dilaksanakan pada 7 Kab/Kota	Pelaksanaan Optimalisasi MTU pada Tahun Anggaran 2021 hanya dapat dilaksanakan pada 2 lokasi (1 angkatan Kab. Bangka Barat, 1	
			2	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	%	75,00	75,00	77.904.803	38.826.484	Dengan adanya pandemi Covid-19, pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah tidak dapat dijalankan sesuai perencanaan.	Hanya dapat dijalankan pada saat kondisi pandemi Covid-19 di buka pada level PPKM tingkat 2.	
				VII	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Persentase kesesuaian pengembangan infrastruktur wilayah dengan rencana tata ruang (%)	%	83,00	83,00	776.688.640	666.720.636		
			1	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	Jumlah dokumen rencana tata ruang Propinsi yang ditetapkan	Dokumen	1,00	1,00	311.444.213	181.461.027	Terbitnya PP Nomor 21 Tahun 2021 dan Permenn ATR Nomor 11 tahun 2021 yang mengamanatkan Integrasi RTRWP dan RZWP3K sehingga pemanfaatan ruang provinsi akan mengacu pada dokumen integrasi RTRWP dan RZWP3K yang akan di tetapkan	Melaksanakan integrasi RTRWP dan RZWP3K pada Tahun 2022	
			2	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah penyelenggaraan dan sinkronisasi pengendalian dan pemanfaatan ruang daerah provinsi	Penyelenggaraan	10	23	465.142.427	374.259.608			
				VIII	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	SURVEY KEPUASAN PELAYANAN UPTD	%	80,00	80,00	661.502.143	386.519.910		
			1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan administrasi umum	%	100,00	100,00	62.651.921	21.501.622			
			2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis	10	10	303.777.643	287.668.945			
			3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD)	Tingkat ketersediaan layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	%	100	100	185.072.579	97.349.343			
				<b>TOTAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>					315.436.418.405	259.601.428.805			
II	URUSAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Dinas PUPRPRKP		I	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN ULTILITAS UMUM (PSU)</b>	Persentase Pemukiman yang terfasilitasi oleh PSU	%	50,00	50,00	2.654.672.662	1.422.315.979		

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD	
				1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah Penyelenggaraan PSU Permukiman	Penyelenggaraan	2,00	2,00	2.654.672.652	1.422.315.979	1. Lokasi pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana jalan desa kerakas berada pada hutan yang berstatus hutan produksi, dimana disepanjang jalan hanya ada perkebunan masyarakat, perkebunan masyarakat, perkebunan milik perusahaan dan pabrik pengolahan minyak sawit. 2. Kegiatan pelaksanaan pembukaan jalan desa kerakas yang tidak berada pada kawasan permukiman, tidak seharusnya melekat pada bidang Cipta Karya dimana sasaran kegiatan bertujuan untuk Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman 3. Kegiatan pembangunan prasarana jalan desa kerakas apabila harus terus dilaksanakan, sangat mungkin tidak mencapai target yang telah ditetapkan (mengingat waktu pelaksanaan tidak cukup)		
TOTAL BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN									2.654.672.652	1.422.315.979				
III	URUSAN PERTANAHAN	Dinas PUPRPRKP		I	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Berkurang Sengketa Tanah Garapan untuk kepentingan umum	%	67,00	67,00	65.427.119	5.960.000			
				1	Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi yang dapat diselesaikan	Sengketa	2,00	2,00	65.427.119	5.960.000	Putusan pengadilan terkait pembayaran ganti rugi tahun 2021	Pembayaran ganti rugi dianggarkan tahun 2022	
				II	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Jumlah Dokumen Penatagunaan Tanah	Dokumen	1,00	1,00	230.738.390	199.888.578			
				1	Kegiatan Perencanaan Penggunaan Tanah yang hamparannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah Provinsi	Jumlah laporan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Laporan	1,00	1,00	230.738.390	199.888.578	Data awal penyusunan masterplan tahun 2013 tidak didapat	Survei ulang pada bulan November 2021	
TOTAL URUSAN PERTANAHAN									296.165.509					
TOTAL URUSAN I + II + III									318.387.256.566	261.023.744.784				



Tabel Hasil Penyelenggaraan Dekon TP

PERANGKAT DAERAH	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PENYERAPAN (%)	
DINAS PUPRPRKP (SKPD TP SDA)	<b>Program Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana</b>	Rp 4.216.202.000	Rp 3.969.180.000	94,14	
	<b>Kegiatan OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air</b>	Rp 3.914.680.000	Rp 3.767.136.000	96,23	
	Operasi Rutin D.I Rias, Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 42 KM; 3.100 Ha; F; S; SY	Rp 307.100.000	Rp 306.900.000	99,93	
	Operasi Rutin D.I Selingsing, Kab. Belitung Timur; Bangka Belitung; 38 KM; 4.318 Ha; F; S; SY	Rp 347.500.000	Rp 279.413.000	80,41	
	Pemeliharaan Saluran Primer Pembuang D.I Rias, Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 1,30 Km; 350 Ha; F; S; SY	Rp 197.830.000	Rp 197.730.000	99,95	
	Pemeliharaan Saluran Sekunder Avour Randu D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,5 Km; 165,20 Ha; F; S; SY	Rp 139.125.000	Rp 139.125.000	100,00	
	Pemeliharaan Saluran Primer Pembuang BM 8 D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 1,50 Km; 150 Ha; F; S; SY	Rp 141.450.000	Rp 141.450.000	100,00	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Atip D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,70 Km; 23,2 Ha; F; S; SY	Rp 92.437.000	Rp 91.685.000	99,19	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Sekunder Metukul D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,70 Km; 200 Ha; F; S; SY	Rp 191.750.000	Rp 191.750.000	100,00	
	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Saluran Sekunder BM.06 D.I Rias; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 0,25 Km; 200 Ha; F; S; SY	Rp 106.625.000	Rp 103.675.000	97,23	
	Pemeliharaan Saluran Pembuang Sekunder D.I Selingsing; Kab. Belitung Timur; Bangka Belitung; 4 Km; 600 Ha; F; S; SY	Rp 131.460.000	Rp 130.480.000	99,25	
	Pemeliharaan Sarana Pendukung Jaringan Irigasi Merantih D.I Selingsing; Kab. Belitung Timur; Bangka Belitung; 8 Km; 250 Ha; F; S; SY	Rp 81.625.000	Rp 81.568.000	99,93	
	Pemeliharaan Rutin D.I Rias, Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 42 Km; 3.100 Ha; F; S; SY	Rp 1.228.120.000	Rp 1.228.712.000	100,05	
	Pemeliharaan Rutin D.I Selingsing, Kab. Belitung Timur; 38 Km; 4.318 Ha; F; S; SY	Rp 860.658.000	Rp 790.035.000	91,79	
	Pelaporan OP Irigasi D.I Rias Berbasis SMOPI; Kab. Bangka Selatan; Bangka Belitung; 1 Lap; 1 Lap; F; S; SY	Rp 89.000.000	Rp 84.613.000	95,07	
	<b>Program Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air</b>	Rp 301.522.000	Rp 202.044.000	67,01	
	<b>Kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>	Rp 301.522.000	Rp 202.044.000	67,01	
	Sistem Pelaporan Elektronik (e-Monitoring); Kota Pangkalpinang; Bangka Belitung; 1 Lap; 1 Lap; NF; AU; SY	Rp 6.450.000	Rp 6.116.000	94,82	
	Administrasi Kegiatan; Kota Pangkalpinang; Bangka Belitung; 1 Lap; 1 Lap; NF; AU; SY	Rp 295.072.000	Rp 195.928.000	66,40	
	<b>DINAS PUPRPRKP (SKPD TP BM)</b>	<b>Program Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</b>	Rp 12.039.041.000	Rp 12.039.039.000	100,00
		<b>Kegiatan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)</b>	Rp 11.924.080.000	Rp 11.924.078.000	100,00
		PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	Rp 815.506.000	Rp 815.506.000	100,00
		PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	Rp 2.028.912.000	Rp 2.028.910.000	100,00
	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	Rp 6.214.281.000	Rp 6.214.281.000	100,00	
	Revitalisasi Saluran Drainase Padat Karya Ruas Jalan Dalam Kota Pangkalpinang - Namang (Tambahan Padat Karya)	Rp 2.865.381.000	Rp 2.865.381.000	100,00	
	<b>Kegiatan OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan)</b>	Rp 114.961.000	Rp 114.961.000	100,00	
	PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN DALAM KOTA PANGKALPINANG - NAMANG	Rp 114.961.000	Rp 114.961.000	100,00	
	SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK KEMENTERIAN PU				
	<b>Program Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga</b>	Rp 693.162.000	Rp 647.396.000	93,40	
	<b>Kegiatan Layanan Umum</b>	Rp 693.162.000	Rp 647.396.000	93,40	
	SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK KEMENTERIAN PU	Rp 30.720.000	Rp 30.180.000	98,24	
	MONITORING DAN EVALUASI	Rp 178.409.000	Rp 169.050.000	94,75	
	<b>Kegiatan Pelayanan Umum Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan</b>	Rp 416.151.000	Rp 394.974.000	94,91	
	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID -19	Rp 60.300.000	Rp 45.813.000	75,97	
	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BMN	Rp 7.582.000	Rp 7.380.000	97,34	

